

BAB II

DINAMIKA KONFLIK INTERNAL DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Pasca kemerdekaan Republik Afrika Tengah mengalami pergantian kepemimpinan dengan cara kudeta yang melibatkan bentrokan antar kubu yang berkepentingan mengambil kekuasaan. Kemerdekaan RAT masih dibayangi oleh Prancis yang menjajah wilayah ini. Bayang-bayang Prancis menunjukkan bahwa kondisi politik pemerintahan belum stabil. Hal tersebut membuat negara RAT rentan akan konflik. Dimulai dari masa pemerintahan David Dacko hingga Francois Bozize kesewenang-wenangan pemimpin negara masih mendominasi. Oposisi-oposisi pada setiap masa pemerintahan muncul dan memberontak.

A. Awal Mula Konflik di Central African Republic

RAT atau Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara yang tidak memiliki wilayah perairan, diapit oleh empat negara Sudan, Kongo, Kamerun, dan Chad. Dengan luas wilayah 622,984.00 km² setara dengan luas wilayah Afganistan dan estimasi populasi yang ada sekitar 5,507,257 jiwa. Di bagian barat daya negara ini terdapat kota Bangui yang dijadikan Ibukota RAT. Ada kurang lebih 542,393 jiwa tersebar di Bangui, dengan dua pertiga penduduknya bekerja sebagai petani. Pendapatan Perkapitanya pun rendah sebesar \$700 diikuti dengan pertumbuhan ekonomi sebanyak 4,5% di tahun 2016 sesuai laporan dari *Central Intelligence Agency* (CIA, 2018).

Sebelum pemberian nama Central African Republic atau Republik Afrika Tengah daerah tersebut lebih dulu bernama Ubangi-Shari. Kebanyakan penduduk disana berasal dari suku Kamerun yang berpindah dari daerah asalnya. Ditambah dengan suku lain yang mulai bermigrasi dari Sungai Nil dan Chad. Abad ke-18 dan ke-19 Suku Banda, Baya, Ngbandi, dan Azande bermukim dan menjadi etnis terbesar di RAT. Menurut

laporan CIA, pada tahun 1885 terjadi perebutan wilayah RAT. antara Prancis dan Jerman. Selama 9 tahun berebut negara RAT, Prancis memenangkan Ubangi-Shari di 1894 (Carayannis & Lombard, 2015).

Prancis sebagai negara yang berhasil memenangkan daerah Ubangi-Shari sebagai teritori kekuasaan belum sepenuhnya terkendali. Pemerintahan tradisional masih dipercaya dan dianggap memiliki otoritas oleh masyarakat setempat. Suku-suku Ubangi-Shari menerapkan sistem kesultanan, hanya yang berdarah sultan yang mampu meneruskan pemerintahan. Untuk memiliki otoritas penuh Prancis perlu meruntuhkan sistem pemerintahan yang telah mendarah daging ini. Tanggal 29 Desember 1903 Prancis berhasil mengalahkan Raja Abbas II dari Mesir yang sebelumnya mengklaim daerah Ubangi-Shari. Setelah keberhasilan ini Prancis membawa kabar kepada sultan Zemo dan Rafai, secara administratif kedua sultan ini memberikan wilayahnya kepada Prancis.

Terhitung dari tahun 1894 Prancis menjajah Republik Afrika Tengah selama 66 tahun. Sampai pada tahun 1960 seorang pemimpin pemberontak bernama David Dacko berhasil memproklamasikan kemerdekaan RAT. Atas dasar ketidakadilan yang diberikan Prancis terhadap masyarakat, David Dacko sebagai perwakilan rakyat merasa dirugikan. Bersama pasukan pemberontak dirinya menyatukan semangat untuk menentang Prancis. Dalam perjalanannya menjadi seorang proklamator, David memimpin RAT selama 6 tahun yakni dari 1960-1966. Kepemimpinan yang singkat ini dikarenakan strateginya yang kurang efektif. Dacko menerapkan sistem partai tunggal yang bernama *Movement for the Social Evolution of Black Africa* (MESAN) dan cenderung mengadopsi kebijakan luar negeri Prancis (Carayannis & Lombard, 2015). Praktik korupsi dan nepotisme menimbulkan stabilitas politik RAT tidak karuan, sekaligus memberi celah untuk di kudeta.

Jean Bedel Bokassa pada tahun 1966 mengambil alih kekuasaan David Dacko dengan berafiliasi bersama pasukan militernya. Keberhasilan dalam merebut kekuasaan Dacko juga didukung oleh aspirasi rakyat karena ketidakpuasan mereka. Rakyat menilai bahwa selama enam tahun kondisi politik dan ekonomi tidak membaik. Terobosan yang ditunjukkan oleh Kolonel Bokassa berbeda dari sebelumnya. Ditahun 1966 sampai dengan 1976 Bokassa memimpin pemerintahan bergaya militeristik dan berubah menjadi monarki pada tahun 1976. Perubahan ini sekaligus penobatan dirinya sendiri sebagai Raja Bokassa I, secara sepihak mendeklarasikan masa kepemimpinannya seumur hidup.

Dalam kepemimpinannya, Bokassa dapat dikatakan berhasil menjalankan program pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur KAE (Kekaisaran Afrika Tengah). Dengan mengoptimalkan sektor agraris seperti kapas dan kacang tanah, pembuatan jalan aspal di beberapa daerah, pengadaan lingkaran lampu merah dan bangunan bertingkat pertama di "*Bangui-la-Coquette*". Namun, dibalik keberhasilan itu Bokassa lemah dalam mempercayai anggota pemerintahannya sendiri. Colonel Izamo rekan militernya dibunuh oleh Bokassa, beserta rombongan anggota presidensial lain juga tewas.

Kontroversi Bokassa membawa kemunduran untuk jabatan politiknya. Keputusan untuk membangun relasi dengan Kolonel Qaddafi yang membawa Presiden CAE (*Central African Empire*) pindah keyakinan ke agama islam dan faktor lain seperti sifat Bokassa yang sewenang-wenang dan keras menimbulkan kegaduhan yang berujung banyak korban. Pada tanggal 20 Desember 1979 pemerintahan Bokassa di intervensi oleh militer Prancis yang sekaligus menyerang Libya. Intervensi ini dikenal dengan *Operation Barracuda*. Prancis menggunakan David Dacko untuk mewakili kepentingannya di Kekaisaran Afrika Tengah. Pengembalian sistem pemerintahan KAE pun dilaksanakan. Sistem kerajaan dihapuskan dan diganti dengan negara republik.

Presiden David Dacko setelah diberikan kekuasaan oleh Prancis tidak mampu bertahan lama. Dua tahun menjabat setelah melengserkan Bokassa, Dacko sebagai Presiden RAT hanya menyalurkan kepentingan Prancis. Kekuatan militer Republik Afrika Tengah yang dipimpin oleh Jenderal Andre Kolingba bangkit kembali untuk memerangi Dacko yang disponsori oleh Prancis. Di tahun 1981 Kolingba berhasil meng kudeta Presiden sebelumnya. Kolingba selaku kepala staf angkatan bersenjata tidak menggunakan kekerasan, kudeta yang dilakukan tanpa pertumpahan darah (Kalck, 2005). Sementara waktu untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Kolingba mengetuai komite pemulihan nasional militer dari tahun 1981 sampai 1985.

Pada tanggal 21 September 1985 Kolingba membubarkan komite pemulihan nasional dan satu bulan setelahnya diangkat menjadi Presiden (Kepala Negara). Pelantikan Presiden tersebut berdasarkan referendum konstitusional yang didalamnya juga berisi pengesahan partai RDC (*Rassemblement Democratique Centrafricain*) sebagai satu-satunya partai legal yang berlaku. Referendum ini disetujui 92.22% dengan tingkat partisipasi 87.6%. Selain itu Andre Kolingba tidak dapat diganggu gugat jabatannya selama enam tahun dan diangkat tanpa adanya pemilihan terlebih dahulu (BBC, 2018).

Aktivistik-aktivis Republik Afrika Tengah menilai bahwa kebijakan satu partai merupakan sekat besar yang menghalangi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik RAT. Apabila sistem satu partai ini diterapkan terus-menerus maka yang terjadi ialah pemberontakan atas kebijakan anti-demokrasi. Melihat dari masa pemerintahan sebelumnya banyak pihak yang merasa kondisi perpolitikan RAT tidak lah adil. Pada bulan Mei 1990 Kolingba memberikan kebijakan baru yang mampu memberi kesempatan partai-partai lain untuk merayakan demokrasi. Kebijakan tersebut mengizinkan keikutsertaan partai-partai lain dalam pemilu yang akan datang (Murison, 2004).

Pesta demokrasi pertama direncanakan pada bulan Oktober 1993 oleh Enoch Durant Lakoue (Pemimpin Partai Sosial Demokrat dan Perdana Menteri Baru). Kendati waktu yang direncanakan terlalu lama menuai protes dari oposisi garis keras dan pemerintah Prancis. Dengan tekanan besar ini memaksa Kolingba untuk mempercepat jadwal pemilihan umum. Bulan Agustus merupakan keputusan terbaik Kolingba dan juga merupakan sejarah baru bagi RAT. Pemilihan Presidential ronde pertama pada tanggal 22 Agustus mengumumkan hasil dukungan. Patasse mendapatkan 37.3% suara, Prof. Abel Goumba 21.7% suara, David Dacko dengan 20.1% suara dan Kolingba hanya mendapatkan 12.1% suara.

Untuk menjadi Presiden Republik Afrika Tengah dibutuhkan suara sebanyak 50+1 dukungan elektoral. Pemilu Presidential RAT menganut *Majority Electoral System* sama seperti Prancis dalam *National Assembly Elections* (King, 2000). Tercatat tanggal 19 September 1993 Patasse dalam ronde kedua memenangkan suara sebesar 52.5%. Mahkamah Agung mendeklarasikan Patasse sebagai Presiden baru pada tanggal 27 September.

Pada tahun ke-3 menjabat sebagai Presiden, Patasse dihantui oleh tekanan dari pendukung setia Presiden sebelumnya. Penyerangan atas nama pengikut setia Andre Kolingba terhadap Pemerintahan Patasse cukup membahayakan kondisi RAT. Karena para pemberontak ini merupakan bekas prajurit tentara pada rezim Kolingba. Alasan lain sekelompok oposisi militer ini menyerang ialah adanya penunggakan gaji untuk para militer. Untuk menghadapi pemberontakan mereka Patasse meminta perlindungan atau pasukan tambahan kepada Prancis. Ratusan pasukan komando khusus beserta tentara dari Prancis bekerjasama dengan tentara lokal RAT yang masih dalam komando Patasse meredam aksi-aksi oposisi (Whiteman, 2011).

Pada tahun 1996-1997 merupakan ambang baru dalam destabilisasi RAT. Penjarahan selama pemberontakan yang berlangsung menyebabkan goyahnya ekonomi di Bangui secara

menyeluruh. Disaat yang bersamaan RAT seharusnya dibawah kepemimpinan Patasse sudah mampu mengendalikan konflik sipil. Keadaan ini menghancurkan stabilitas fundamental kota dan melahirkan budaya konflik dimana penggunaan kekuatan militer secara terus menerus tidak lagi mengejutkan (Melly, 2002). Keadaan tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap dukungan masyarakat terhadap Patasse. Di tahun 1999 diadakan Pemilu Presidensial yang di ikuti oleh sepuluh kandidat. Patasse menjadi Presiden kembali dengan perolehan suara 51.63% (BBC, 2018).

Setelah terpilih kembali menjadi Presiden, berjalan dua tahun dan terjadi penyerangan kembali. Ibukota Bangui pada tahun 2001-2002 ditekan oleh pemberontak. Diduga para pemberontak merupakan utusan dari Jenderal Kolingba, Jean-Jacques Demafough, dan mantan kepala staf Patasse yaitu Jenderal Francois Bozize semuanya dituduh mengatur upaya kudeta. Di tahun ini percobaan kudeta belum mampu melengserkan Patasse, karena pemerintah RAT dibantu oleh sekutu (Kongo dan Libya). Chad kemudian dituduh Patasse membantu Bozize merencanakan kudeta. Untuk menertibkan keadaan, pemerintah bersama sekutu membantai sedikitnya 120 warga sipil Chad yang berada di Bangui (Zapata, 2012).

Strategi kudeta dilakukan lagi pada tahun 2003, dimana Patasse sedang mendatangi pertemuan internasional di Nigeria. Pasukan Bozize-Chad melakukan penjarahan di ibukota merampas segala sesuatu yang ada tempat itu. Pemberontakan ini juga didukung oleh keadaan RAT yang sedang rapuh karena terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi RAT mulai tahun 2000. Hal ini terjadi karena harga minyak internasional semakin tinggi dan RAT harus menanggung dua kali lipat biaya transportasi minyak (Hodgkinson, 2003). Bozize mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden secara sepihak merebut kekuasaan eksekutif dan legislatif di tahun 2003. Ditahun selanjutnya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan Bozize mengajukan referendum untuk mengatur Pemilu Presidensial yang demokratis. Pemilu berlangsung dua ronde

pada bulan Maret dan Mei 2005 yang dimenangkan oleh Francois Bozize dengan perolehan suara 65%. Pada masa Presiden Bozize RAT mengalami lembar baru sebagai sebuah negara yang mencoba menerapkan sistem demokrasi (HRW, 2007).

B. Dinamika Konflik Pada Masa Pemerintahan Francois Bozize

Sejak terpilihnya Bozize tahun 2005 pada awal pemerintahannya, rakyat mulai curiga dan melakukan aksi protes yang diwakilkan oleh pihak oposisi. Tindakan Eksploitasi sumber daya alam ditambah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dilakukan oleh rezim Francois Bozize setelah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Presiden sebelumnya. Pada bulan September 2006 mulai bermunculan aktivitas pemberontak di bagian barat laut dan timur laut. Akibatnya Bozize sempat kehilangan kendali atas sebagian wilayah yang ia kuasai.

Bentrokan terjadi antara militer dan oposisi guna menyuarakan ketidaklayakan Bozize berada ditahta Presiden. Kecurangan dalam eksploitasi SDA yang mana sebagian besar keuntungan mengalir kepada kelompok kepentingan Francois Bozize menjadi alasan utama rakyat menentang rezim ini. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat berarti pemerintahan tersebut gagal dalam membangun negaranya (Ahluwalia, 2001).

Akibat persamaan persepsi bahwa Bozize tidak layak untuk memimpin negara, kelompok – kelompok oposisi bermunculan untuk menentang kekuasaan Francois Bozize. Cita – cita berbagai kelompok ini kurang lebih sama yaitu meminta agar Bozize turun dari jabatan kepresidenannya. Aktor utama dalam pemberontakan oposisi ialah Persatuan Pasukan Perdamaian untuk Kesatuan (UFDR) disusul oleh beberapa kelompok lain seperti Front Demokratik Rakyat Republik Afrika Tengah (FDPC), Tentara Rakyat Pemulihan Demokrasi (APRD),

Konvensi Patriot Keadilan dan Perdamaian (CPJP), Konvensi Patriot untuk Penyelamatan Negara (CPSK) (BBC, 2018).

Konflik internal di RAT ini pada tahun 2007 dipengaruhi oleh keadaan negara-negara sekitar seperti Kongo dan Sudan yang berseteru dengan negara pecahan mereka. Perseteruan ini sampai pada titik penggunaan senjata untuk menyerang pihak-pihak lawan mereka. Akibatnya penyedia senjata ilegal pada wilayah afrika yang berkonflik mudah untuk diakses oleh para pemberontak. Tercatat bahwa UFDR merupakan oposisi atau kelompok kepentingan pertama yang memberontak. UFDR berhasil membuat panik pemerintah sampai pemerintah mengajukan perjanjian perdamaian di tahun 2007 yang berisi tuntutan dari UFDR dan gencatan senjata. Di tahun selanjutnya yaitu 2008 kelompok-kelompok lain seperti APRD dan FDPC menekan pemerintah. Tidak jauh berbeda dari strategi sebelumnya, Bozize mengajukan perjanjian perdamaian yang berisi permintaan pemerintah untuk pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi. Sebaliknya, para oposisi meminta pembagian kekuasaan dan pembebasan tahanan terhadap anggota-anggotanya. Namun Perjanjian Birao (2007) dan Perjanjian Libreville (2008) tidak mampu direalisasikan oleh pemerintah.

Para pemimpin kelompok oposisi yang terlibat perjanjian Birao dan Libreville pada tahun 2010 mengecam pemerintah. Aksi boikot pemilu sebagai keseriusan menentang pemerintah akan dilakukan menjelang dan setelah pemilu 2011. Dan terbukti pada kemenangan Francois Bozize di tahun 2011 dihujani tuduhan-tuduhan kecurangan pemilu. Aksi tersebut semakin mengancam situasi keamanan Republik Afrika Tengah (Eberhard, 2014).

C. Perkembangan Kelompok Pemberontak di Republik Afrika Tengah

Setelah Francois Bozize terpilih kembali menjadi Presiden pada tahun 2011 kelompok-kelompok kepentingan yang sempat melakukan perjanjian perdamaian dan boikot membentuk suatu

koalisi. Mereka sadar kapasitas kekuatan mereka masih kurang ketika harus melawan Bozize yang memiliki pasukan militer dan backup pasukan luar negeri yang solid. Ditambah terdapat kesamaan kepentingan kelompok UFDR, CPJP, dan FDPC. Kelompok-kelompok ini merasa bahwa Presiden tidak melakukan pembagian kekuasaan pada kelompok atau partai lain. Akibatnya pada tahun 2012 dengan dimotori oleh Michael Djotodia membentuk koalisi pemberontak yang bernama Seleka.

Petinggi dari kelompok Seleka mayoritas beragama islam seperti Mahamat Nouredine Adam (Wakil Ketua Seleka), Mohammed M. Dhaffane (Pendiri CPSK), Abdoulaye Issene (Pendiri CPJP), Mahamat Al Khatim (Mantan Pemberontak Chad) dan Zakaria Damane (Mantan Pemimpin UFDR). Bersatunya para petinggi kelompok-kelompok ini otomatis menambah kekuatan Seleka. Ada sekitar 7-10.000 pasukan dalam komando Seleka dari tahun 2012-2014 (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014).

Pergerakan kelompok ini di tahun 2012 merambat dari timur ke barat. Mereka mencoba menguasai beberapa kota seperti Ouadda, Ndele, Bamingui dan Bambari. Pemberontakan yang terjadi merupakan konfrontasi dengan pasukan pemerintah.

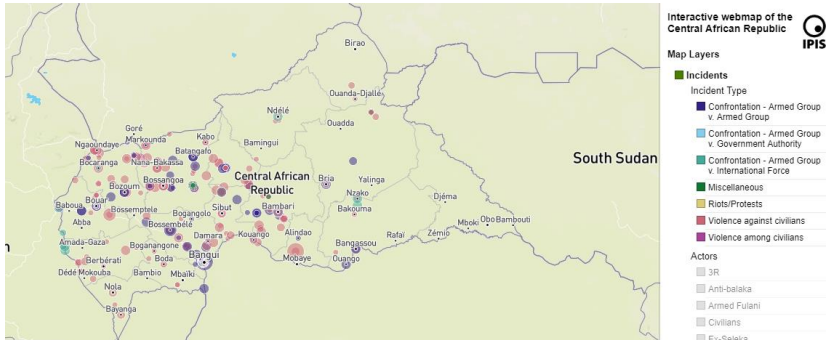
Dapat terlihat dibawah ini merupakan pergerakan awal kelompok Seleka.



Gambar 2.1 Pergerakan Awal Kelompok Seleka di Tahun 2012

Sumber: <http://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/car/v2/#5.168084284143305/26.35123864911816/5/4/1/2.6s>

Diperbatasan antara Bambari dan Alindao terdapat bentrokan lain antara Seleka dan penduduk setempat. Perkembangan kelompok seleka terbilang cepat dan mengancam pemerintah pada saat itu. Francois Bozize mencurigai adanya pasokan senjata dari negara tetangganya yaitu Chad. Tekanan demi tekanan membuat Seleka mampu merebut beberapa kota RAT. Kekalahan Bozize di beberapa daerah dikarenakan oleh strategi pertahanan yang melemah akibat ketidakpercayaan Bozize terhadap militer RAT. Hal ini merupakan bentuk kekhawatiran Bozize mengingat sejarah pergantian presiden RAT berupa kudeta oleh militer (Herbert, Dhukan, & Debos, 2013).



Gambar 2.2 Peningkatan Pegerakan Kelompok Seleka di Tahun 2013-2014

Sumber: <http://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/car/v2/#5.168084284143305/26.35123864911816/5/4/1/2.6s>

Pergerakan Seleka memuncak pada tahun 2013 ketika Perjanjian Libreville kedua tidak benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Isi dari Perjanjian Libreville kedua ini menyangkut perekrutan “pejuang” Seleka menjadi tentara nasional Republik Afrika Tengah, perombakan keanggotaan parlemen beserta PM RAT, dan janji Presiden Bozize untuk berhenti mencalonkan diri sebagai Presiden di Pemilihan Umum yang akan datang. Pada tanggal 22 Maret 2013 Kelompok Seleka memberontak menguasai kota-kota penting di wilayah barat dan di ibukota Bangui. Dalam pemberontakan ibukota, Seleka berhasil mengambil alih wilayah tersebut dan mengusir Francois Bozize dari tahta kepresidenan. Dalam peristiwa pemberontakan di Bangui Bozize berhasil menyelamatkan diri dan pergi ke Kamerun untuk mengungsi.

Pemimpin Seleka Michael Djotodia secara sepihak mengumumkan dirinya sebagai Presiden pada tanggal 24 Maret 2013. Daerah-daerah barat yang belum dikuasai seperti Nola, Mbaiki, Berberati, Baoro, Ngaoundaye, dan Bossembele mulai didatangi dan diambil alih. Karena pemimpin RAT diganti oleh ketua Seleka maka pergerakan kelompok ini semakin gencar. Kuasa penuh telah berhasil

dipegang oleh Michael, hal ini membuat kelompok Seleka mendapatkan tambahan anggota dan kekuatan yang berlebih. Sampai kekuatan militer RAT kewalahan saat menghadapi pasukan Seleka.

Kondisi perpolitikan di RAT semakin tidak stabil meskipun Michael Djotodia menjadi Presiden. Sebelumnya, Michael yang mengetuai Seleka menyuarakan ketidakadilan Bozize dalam memimpin negara. Menuduh rezim sebelumnya melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi, pada masa pemerintahan Michael tindakan tersebut masih ada dan semakin tidak terkendali. Kritik dilemparkan oleh masyarakat internasional ketika melihat situasi RAT saat dipimpin oleh ketua Seleka. Uni Afrika mengancam tindakan pemberontakan yang dilakukan Michael Djotodia bersama kelompoknya. Sebagai perwakilan suara kawasan afrika, Uni Afrika tidak mengakui Michael sebagai Presiden baru RAT. Ancaman juga diberikan kepada rezim ini bahwa tindakan kudeta pada bulan Maret 2013 akan dilaporkan ke Pengadilan Internasional.

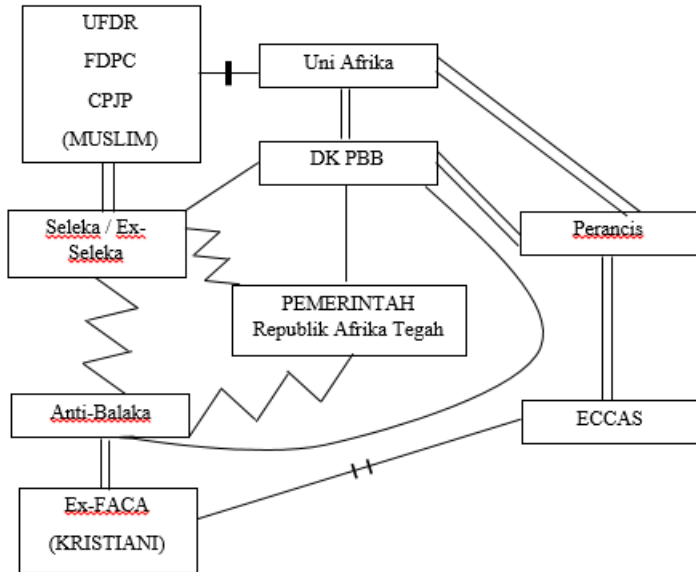
Kritikan masyarakat internasional membuat Michael membubarkan kelompok Seleka di bulan September 2013. Keputusan ini diambil karena desakan-desakan masyarakat internasional yang beranggapan bahwa segala kebijakan RAT yang berlaku hanya untuk kepentingan Seleka. Secara formalitas kelompok Seleka dibubarkan, maksudnya meskipun telah dibubarkan namun kekuatan pejuang seleka masih ada dan tersebar didaerah-daerah. Loyalitas mereka terhadap Michael Djotodia sangat tinggi (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014).

Meskipun telah dibubarkan, Seleka telah menguasai sumber daya alam RAT tercermin pada dominasi kepemilikan industri tambang seperti uranium, berlian, besi dan emas. Hampir diberbagai daerah potensial dikuasai kelompok ini otomatis segala keuntungan mengalir pada petinggi dan anggota Seleka. Kekuasaan mereka juga disalahgunakan seperti memperkosa, merampas harta, dan membunuh warga sipil. Tindakan ini

memunculkan perlawanan balik dari mantan anggota militer Bozize atau *Force Armees Centrafricanes* (FACA) diketuai oleh Patrice E. Ngaissona. Berbeda dengan kelompok Seleka yang bergerak dari timur RAT, kelompok pimpinan Patrice memulai perlawanannya dari barat.

Anti-Balaka nama lain dari *Force Armees Centrafricanes* secara cepat melakukan mengambil alih kekuasaan di beberapa kota setelah Michael Djotodia membubarkan kelompok Seleka. Dibulan yang sama pembubaran Seleka, Anti-Balaka mulai menguasai Bossangoa. Dengan waktu dua bulan pemberontakan Anti-Balaka mengakibatkan banyak korban. Tim peneliti Human Rights Watch melaporkan bahwa lebih dari 120 orang meninggal ulah Anti-Balaka dan 37 orang tewas akibat serangan ex-Seleka di daerah Bossangoa (HRW, 2013). Tidak lama setelah bentrokan antara Anti-Balaka dan ex-Seleka di Bossangoa, daerah inti Bangui dikuasai oleh Anti-Balaka. Di Bangui, Anti-Balaka dipersenjatai AK-47 dan peluncur granat untuk memberantas seluruh orang muslim ex-Seleka. Militan Anti-Balaka mengatakan kepada HRW bahwa misi mereka adalah membunuh Muslim tanpa ada sisa di Bangui (HRW, 2014).

Berikut merupakan gambar peta konflik internal Republik Afrika Tengah:



Gambar 2.3 Peta Konflik Internal Republik Afrika Tengah

Sumber: diambil dari berbagai sumber

Keterangan :

- Netral
- ||————— Tidak Memiliki Hubungan
- ===== Koalisi
- ⚡ Berkonflik

Konflik Internal Republik Afrika Tengah melibatkan aktor-aktor dari dalam dan luar negeri. Aktor-aktor inti konflik tersebut merupakan kelompok Seleka dan Pemerintah Republik Afrika Tengah. Yang kemudian berkembang menjadi konflik etnis setelah Michael Djotodia mendeklarasikan diri sebagai presiden. Ditambah dominasi seleka terhadap kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya alam memicu kecemburuan masyarakat mayoritas kristiani di RAT yang kemudian membentuk kelompok Anti-Balaka bersama mantan militer FACA. Dewan Keamanan PBB dibantu oleh Prancis, Uni Afrika, dan ECCAS berusaha mengembalikan keamanan RAT beserta kedaulatannya. Sebab, jabatan Presiden Michael Djotodia tidak diakui oleh Masyarakat Internasional karena tidak melalui proses politik yang sesuai konstitusi.

Posisi Pemerintah Republik Afrika Tengah pada peta konflik tersebut dimaksudkan untuk Francois Bozize dan Michael Djotodia yang mengambil alih kekuasaan pasca kudeta Bozize. Seleka menyerang rezim Bozize sampai berhasil menguasai Ibukota Bangui, setelah perebutan kekuasaan oleh Michael Djotodia kelompok pemberontak yang terdiri dari ex-FACA (Militer RAT) dan penduduk kristiani mulai menyerang pemerintah sejak tahun 2014. Kelompok tersebut merupakan Anti-Balaka yang pergerakannya semakin menyebar sampai Ibukota Bangui setelah mendengar kabar Michael Djotodia membubarkan kelompok Seleka.

Dalam Peta Konflik tersebut Dewan Keamanan PBB berada dalam posisi tengah. Artinya, tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Justru, menjadi pihak eksternal yang konsisten mengawal konflik internal sampai terwujudnya keamanan dan perbaikan keadaan perpolitikan di Republik Afrika Tengah

